



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO



DPRD Minta Audit Titik Parkir



DHAMRONI CHUDLORI
Anggota Badan Anggaran



M ROJIK
Juru Bicara Badan Anggaran



SUDJALIL
Anggota Badan Anggaran

KOTA-Pengelolaan parkir di wilayah Sidoarjo masih belum menemukan titik terang. DPRD Sidoarjo meminta agar dilakukan audit mendalam terhadap titik-titik parkir yang dikelola oleh pihak tertentu. Di luar PT ISS yang menjadi pemenang lelang pengelolaan parkir.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo M Rojik menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat paripurna, Senin (3/7). Menurut dia, audit khusus tersebut perlu dilakukan. "Untuk mengungkap potensi kerugian negara yang selama ini terjadi akibat pemungutan parkir yang tidak semestinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Rojik juga mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo untuk melakukan insyurawarah dengan PT ISS sebagai pengelola parkir. Diharapkan

dengan musyawarah tersebut, akan tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dhamroni Chudlori juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengelolaan parkir. Politikus PKB itu fokus pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Meskipun kerjasama antara Dishub dan PT ISS telah berakhir, pengelolaan parkir tetap berjalan, dan para juru parkir di lapangan masih memungut biaya dari pengguna.

Menurut dia, saat ini, situasinya masih status quo. Tidak jelas siapa yang mengelola parkir tersebut. Namun, kenyataannya, warga Sidoarjo masih harus membayar parkir.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua

Komisi A DPRD itu meminta agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera mengeluarkan kebijakan untuk melindungi uang rakyat yang dikumpulkan dari sektor parkir tersebut.

Hingga saat ini, besaran uang yang dikumpulkan dari sektor parkir belum diketahui. "Kami berharap adanya kebijakan atau diskresi untuk menjaga uang negara yang diperoleh dari sektor parkir ini," ucapnya.

Selain itu, dengan adanya pihak yang bertanggung jawab, pelayanan kepada masyarakat pengguna parkir akan lebih terjamin jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di area parkir.

Anggota Badan Anggaran (DPRD) Sidoarjo Sudjalil juga meminta Pemkab untuk mencari jalan keluar terbaik dalam penataan layanan parkir. Bagaimana



DITATA: Salah satu titik parkir yang masuk dalam potensi pendapatan.

agar parkir ini menghasilkan pendapatan dan layanan yang baik bagi masyarakat.

Terutama dalam penentuan titik-titik parkir yang akhirnya masuk menjadi SK bupati. Titik-titik itu kemudian menjadi acuan kerja sama Pemkab Sidoarjo dengan pihak swasta, dalam hal ini PT ISS. "Nah, seharusnya, sebelum menyetujui kerja sama, kedua pihak harus sama-sama tahu itu," ujarnya.

Tidak seperti saat ini. Titik-titik parkir itu akhirnya menjadi masalah, karena, titik parkir yang di dalam SK bupati itu berbeda dengan kajian tim Independen.

Berikutnya terjadi gugatan ke jalur hukum.

Menyikapi temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berjanji akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut. Muhdlor menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo diberi batas waktu selama 60 hari. Tepatnya hingga 24 Juli, untuk menyelesaikan rekomendasi dari BPK, termasuk masalah pengelolaan parkir.

Bupati Muhdlor juga menekankan bahwa selain masalah parkir, permasalahan administrasi lain-

nya juga akan ditangani secara serius. Harapannya, kejadian semacam ini tidak akan terulang di tahun-tahun berikutnya.

Terpisah dari proses audit dan rekomendasi BPK, terdapat proses hukum yang sedang berlangsung antara PT ISS dan Dishub Sidoarjo. Menanggapi hal itu, Muhdlor menyampaikan bahwa BPK bersedia membuka pintu konsultasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

"Kepala BPK Jatim sudah menyampaikan bahwa pintu kantor BPK selalu terbuka untuk berkonsultasi maupun hal lainnya," ujar Muhdlor. (nls/vga)



✓ Wabup Sidoarjo Tekankan *Stop Bullying*

SURABAYAPAGI, Sidoarjo - Semua sekolah dari mulai jenjang Taman Kanak - Kanak/RA hingga SMA/SMK melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di bawah naungan Yayasan Wachid Hasjim juga menggelar MPLS yang dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo H Subandi SH selaku Inspektur upacara, Senin (17/7) di Komplek Sekolah Wachid Hasyim, Sedati.

Menurut Subandi kegiatan MPLS ini positif bagi siswa baru yang baru masuk dan pada fase transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pihak sekolah juga harus memperhatikan Batasan MPLS sesuai regulasinya Permendikbud No. 18 Tahun 2016. Jangan membebani siswa dengan tugas yang menyulitkan.

“Seyogyanya untuk kegiatan MPLS bagi siswa baru, memberikan pengalaman baru yang menyenangkan dan



SP/HIKMAH

Wakil Bupati Sidoarjo H Subandi SH saat meninjau MPLS.

mengesankan,” ungkapnya.

Ia yang juga alumni dari SMP angkatan 92 Yayasan Pendidikan Wachid Hasjim, menghimbau kepada para siswa, terutama siswa baru, untuk menghindari bullying dan narkoba. Keduanya ini bisa merusak generasi bangsa.

“Bullying ini dampaknya luar biasa sekali, bukan ha-

nya dampak secara fisik saja namun juga secara psikis. Selain itu reputasi instansi/lembaganya sudah pasti akan terkena imbasnya,” jelasnya.

Melalui kegiatan MPLS ini, harapannya akan membentuk siswa menjadi insan yang beriman, disiplin, berakhlak mulia, kreatif dan berprestasi. ■Hik/Mas/Eny

Jangan Ada Jukir Memungut Upah Melebihi Ketentuan

Kota Malang, Bhirawa

Wali Kota Malang, Sutiaji saat memberikan pembekalan kepada 200 juru parkir di Kota Malang, Senin (17/7) kemarin meminta kepada para juru parkir agar tidak memungut uang parkir melebihi ketentuan.

"Saya minta kepada juru parkir untuk tidak menarik biaya parkir melebihi ketentuan. Agar orang berkunjung di Kota Malang tidak merasa keburatan," tukasnya.

Sutiaji menyebut, seorang jukir yang menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai bentuk layanan kepada pengunjung maka akan terkesan baik.

"Selain mendapatkan nilai nominal rupiah. Menjaga parkirnya se-

panjang belum diambil oleh pemiliknya, dan berikan kesan orang merasa nyaman," tukasnya.

Semua lanjut Sutiaji, akan bernilai ibadah, dengan catatan cara kerjanya dijalankan dengan baik dan amanah.

"Hal seperti ini jika tidak dikuatkan dari diri para jukir, berniat ibadah dalam setiap pekerjaan," urai Sutiaji.

Pembinaan jukir hendaknya terus dikuatkan secara terus menerus. Karena memberikan nilai positif bagi banyak orang. Utamanya kepribadian para jukir itu sendiri.

"Selain membantu meringankan tugas pemerintah maupun meningkatkan nilai PAD di Kota Malang. Target yang diberikan kepada Dishub, mampu terpenuhi

dengan mudah," tambah Sutiaji.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, selalu memberikan pembinaan. Kepada seluruh jukir di Kota Malang berjumlah 4200 orang.

Kepala Dishub Kota Malang, R. Widjaja Saleh Putra menyampaikan, pembinaan jukir memiliki beberapa tujuan, pertama masyarakat yang mengelola lahan parkir. Hendaknya menjaga sebaik mungkin pengelolaan maupun penataannya.

"Karena dari situ para jukir mengais rejeki untuk keluarganya. Sehingga ada bahasa istilah, Jagalah Parkirmu Disitulah Rejekimu," tutur Widjaja, di Hotel Atria Malang.

Widjaja lantas menyampaikan kepada jukir adanya dedikasi dan tanggungjawab terbaik.

"Sebaliknya, seorang jukir mampu melayani masyarakat lebih santun, ramah serta humanis. Mampu menjadi partner Pemkot Malang membantu PAD lebih bagus lagi," jelas dia.

Menurut, semua jukir mampu memiliki sikap positif. Sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Pihaknya berkeyakinan membantu mendorong atau berimbis pada peningkatan PAD.

"Target kami pada 2022 sebesar Rp12 miliar, terealisasi sebesar Rp 9,6 miliar. Sementara di 2023 targetnya sebesar Rp12,1 miliar, di semester pertama baru tercapai Rp 5,5 miliar. Dengan titik lokasi parkir resmi di Dishub. Yang aktif adalah sebanyak 680 titik, dan 161 tidak aktif," sambungnya. Dia menyebutkan, kantong parkir yang dit-

erapkan e-parking ada tujuh lokasi. Diantaranya, Pasar Madyopuro, Gedung Kartini, RSUD Kota Malang, Block Office, MCC, MOG.

"Selain dari data yang disebutkan secara legal, kita pun bakal meneruskannya," tandas Jaya. Apabila ditemukan tidak tertib dan tidak disiplin dalam bekerja parkir, seperti tidak menggunakan atribut, tidak memiliki KTA serta tidak memberikan i karcis retribusi parkir, sudah pasti akan ditinggalkan. [mut-gat]

m taufiq/bhirawa
Foto Bersama Wali Kota Malang Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang I Made Ruedana Karika dan Kepala Dishub Kota Malang R. Wijaya Saleh Putra usai pembukaan pembinaan jukir di Hotel Atria Malang Senin 17/7 kemarin.



HARIAN
Bhirawa
Mata Jember Online

10 Balita Telantar Kini Punya Orang Tua Asuh

SIDOARJO - Sebanyak 10 anak binaan atau calon anak angkat (CAA) dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Sosial Asuhan Balita (UPT PPSAB) Sidoarjo dilepas kepada 10 pasangan calon orang tua angkat (COTA) kemarin (17/7).

Kasi Perlindungan Sosial UPT PPSAB Sidoarjo Riyanti menyatakan, 10 COTA yang dipilih untuk mengasuh balita tersebut berasal dari beberapa kota di Jawa Timur. "Ada yang dari Sidoarjo, Surabaya, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Sumenep datang dalam acara ini," ungkapnya.

COTA yang datang dalam kesempatan tersebut sudah melalui proses seleksi dan pemenuhan persyaratan. Hingga akhirnya bisa mendapatkan SK asuh dari pihak tim pertimbangan izin pengangkatan anak. "SK asuh ini baru awal dan dengan surat tersebut para COTA ini diizinkan untuk merawat atau mengasuh balita



BERI KASIH SAYANG: Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menyerahkan balita dari UPT PPSAB kepada calon orang tua asuh kemarin.

dari kami," ungkapnya. Balita yang diasuh COTA baru bisa diangkat menjadi anak secara administrasi dan resmi saat sudah keluar SK pengangkatan anak. "Jadi, ini 10 pasangan akan dibarkan mengasuh balita ini selama enam bulan," katanya. Setelah itu, pihak

tim pertimbangan izin pengangkatan anak bersama UPT PPSAB akan mengecek kembali. "Dari situ baru diputuskan apakah anak baik-baik saja di lingkungan barunya, selepas itu baru bisa kita berikan SK pengangkatan anak," jelasnya. Sebanyak 10 balita asuh yang

diserahkan kemarin berusia kurang dari setahun sampai umur 2,5 tahun. "Kebanyakan laki-laki, perempuannya hanya ada dua," imbuhnya. Menurut dia, tidak semua anak asuh yang ada di UPT PPSAB Sidoarjo bisa diberikan. Perlu waktu pencocokan saat COTA pertama datang dan memberikan permohonan. "Selain umurnya, ada beberapa faktor lainnya seperti kesiapan anak, kemudian kesehatan juga," tuturnya.

Riyanti menyatakan, tidak ada anak yang tergolong disabilitas yang diserahkan kepada COTA. "Ada memang anak asuh disabilitas, tapi saat ini belum ada yang siap, baik dari balita ataupun COTA," imbuhnya. Balita yang bisa diserahkan ke COTA biasanya sudah melewati tiga bulan sejak pertama ditemukan. "Kami infokan ke publik dulu selama tiga bulan baru nanti jika tidak ada, kita siapakan untuk bertemu orang tua asuh," katanya. (eza/c6/any)

Jawa Pos

Manfaatkan Lahan Aset Pemerintah untuk Sentra PKL



MASIH SEPI: Sentra kuliner di Jalan Gajah Mada diharapkan bisa jadi jujukan masyarakat.

KOTA - Penambahan titik baru bagi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin menjamur diperlukan. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyebutkan, para pedagang dapat ditempatkan di suatu kawasan yang terpusat. Seperti beberapa sentra PKL yang sudah ada di Sidoarjo. Salah satunya di Jalan Gajah Mada.

Menurut dia, pembuatan sentra PKL tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dia menilai, Pemkab harus mengakomodir PKL terutama yang asli Sidoarjo agar dapat tertata dengan rapi dan tidak mengganggu estetika kota. Terutama untuk PKL yang berjualan kuliner, dapat dibuatkan tempat

sentra kuliner.

"Seperti pusat jajanan serba ada (pujasera) yang ditata dengan baik dan ditempatkan sesuai standar," ujarnya.

Sebab banyak pedagang yang berjualan mencari tempat strategis, namun tidak memperhatikan kebersihan dan estetika. Sehingga perlu diakomodir dan ditata dengan cara dicarikan tempat atau lokasi yang tidak melanggar aturan.

Politikus yang akrab disapa Wawan itu menyebutkan, Pemkab harus tegas terhadap PKL yang berada di zona larangan. PKL yang berada di zona tersebut harus ditertibkan sejak dini.

Jika PKL sudah terlanjur berada di zona larangan, mereka dapat ditata dan dicarikan lokasi lain yang memungkinkan atau dibuatkan pusat atau sentra kuliner baru. Misalnya PKL di Jalan

Gajah Mada dimasukkan ke dalam gedung sentra PKL kuliner. Sehingga saat ini jalan sudah terlihat lebih rapi dan tidak semrawut.

Di waktu sore sentra PKL masih cukup sepi. Tak banyak pengunjung yang datang ke tempat tersebut.

"Pukul 21.00 ke atas pengunjungnya banyak," kata Wahyuni, salah satu pedagang.

Dendi, salah satu pengunjung mengungkapkan bahwa tempat tersebut sudah cukup nyaman. Menurutnya hal tersebut dikarenakan rapinya penataan PKL.

Meski begitu, untuk akses menuju sentra PKL kurang enak. Sebab Jalan Gajah Mada hanya digunakan untuk satu arah.

"Pas kelewatan, nggak bisa langsung, harus putar balik jauh banget," ucap keluhnya. (nis/sai/vga)



Proyek JPL 64 Krian Ditargetkan Rampung Desember

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus berupaya merampungkan proyek infrastruktur pada akhir tahun 2023. Di antaranya dua proyek besar yaitu pembangunan *flyover* pengganti jembatan penyeberangan lintas (JPL) 64 km Krian dan pembangunan *flyover* pengganti JPL 79 km Tarik.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali pada Jumat (14/7) mengatakan kedua proyek tersebut akan selesai pada Desembertahun ini. Sebab sejauh ini progres konstruksi untuk JPL 64 Krian sudah mencapai 77 persen. Sedangkan progres konstruksi untuk JPL 79 Tarik mencapai 61 persen.

"Saya kira cukuplah waktu untuk pengerjaan kedua proyek hingga akhir tahun 2023 ini. Apalagi hanya tinggal mengejar 23 persen untuk JPL 64 Krian, dan 39 persen lagi untuk JPL 79 Tarik. Sehingga nantinya kita berharap kemacetan di perlintasan sebidang Krian dan Tarik ini akan dapat terurai," jelas Gus Muhdlor

panggilan akrab bupati.

Pembangunan JPL 64 Krian dan JPL 79 Tarik ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo dengan Kementerian Perhubungan Ditjen Perkeretaapian serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sekaligus Ketua Tim Percepatan Persiapan Pembangunan *Flyover* JPL 64 Krian dan JPL 79 Tarik Fachrudin Arifin mengatakan, proses cepat ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dengan ditjen perkeretaapian untuk pembangunan kedua proyek

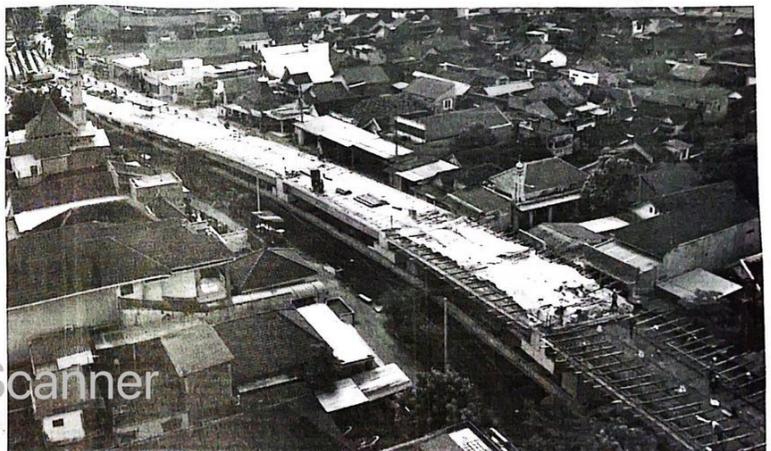
flyover tersebut.

"Kita terus memantau agar proyek *flyover* Krian dan Tarik ini selesai sesuai target. Sejauh ini kedua proyek menunjukkan progres yang memuaskan," ujar Bachruni.

Dari Data Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pembangunan *flyover* pengganti JPL 64 km Krian 38+897 Lintas Surabaya-Solo mencapai 77 persen dari rencana awal 70 persen.

Artinya mengalami surplus pengerjaan sebesar 6,668 persen. Sedangkan pembangunan *flyover* pengganti JPL 79 km Tarik 43+376 Lintas Surabaya-Solo mencapai progres 61 persen dari rencana awal 70 persen atau mengalami deviasi (penurunan dari target) sebesar 9 persen. (jok/nuw)

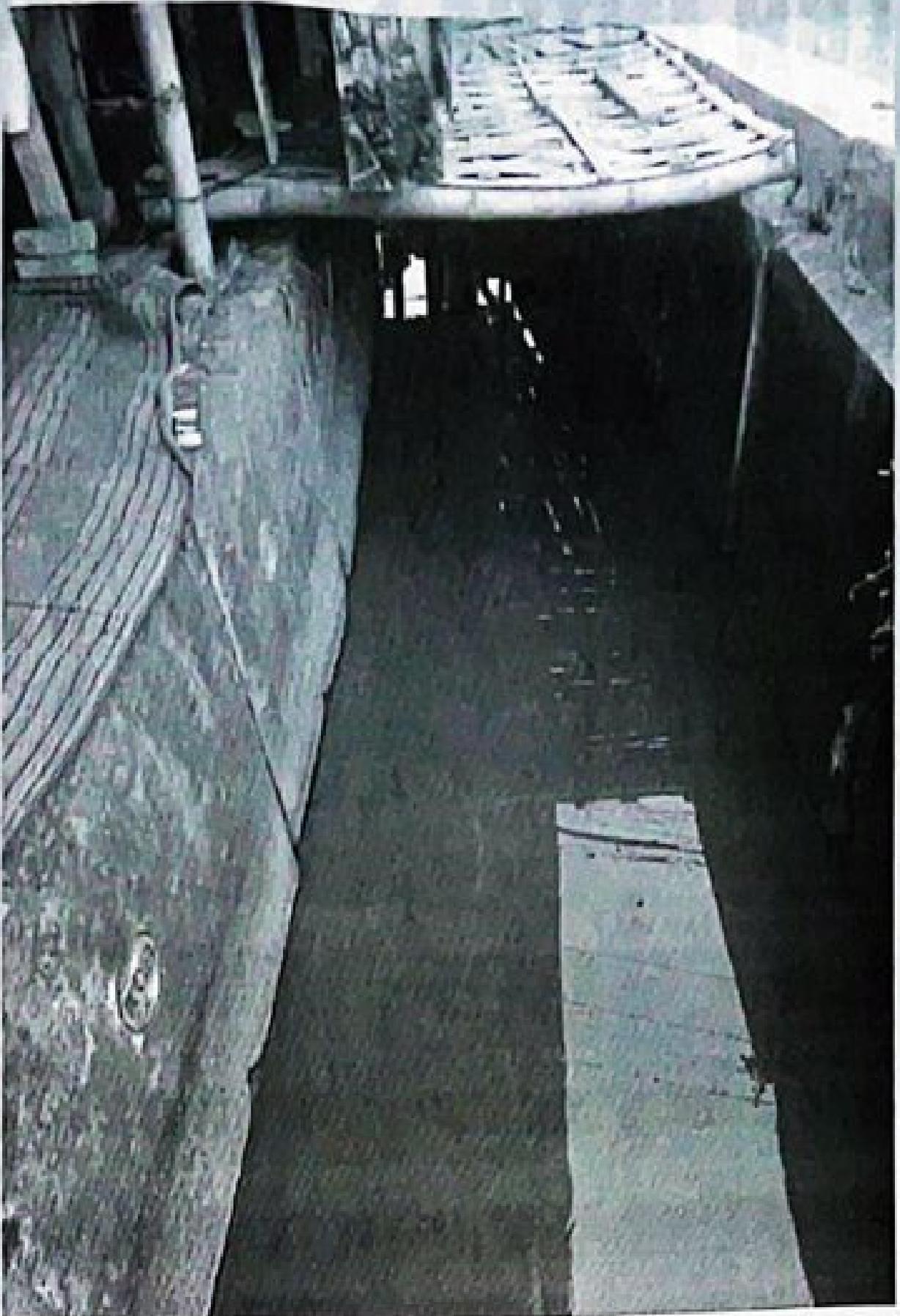
Proyek JPL 64 Krian terus dikerjakan dan progres konstruksinya telah mencapai 77 persen.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Limbah cair yang dibuang di ingas Wonokupang.

DIDUGA PT SANTOSO JAWI ABADI BUANG LIMBAH CAIR SEMBARANGAN

Diperbanyak oleh: Suni Ag, Prida dan Rusman dan Lina Sekretaris DPRD Sidoarjo

IRIGASI WARGA DESA WONOKUPANG

Sidoarjo, Pojok Kiri

Bahaya limbah cair terhadap lingkungan yang diduga dari limbah cair PT Santoso sangatlah berdampak terhadap kesehatan warga Wonokupang. Ucapan Waras warga sekitar pada wartawan, Senin 17/7/23.

Dia menolak keras adanya limbah cair berbahaya dari pabrik itu, cetusnya. Bahkan menjadi prioritas dalam melakukan tindakan antisipasi menjaga lingkungan tetap sehat yang diinginkan oleh warga Wonokupang.

Sedangkan dugaan perbuatan ngawor dari perusahaan penghasil limbah cair membuat jengkel pada masyarakat. Sementara terkait aturan serta sanksi pidana bagi perusahaan Penghasil limbah pejabat yang berwenang belum memberikan kartu merah, Kata Wahid warga Wonokupang pada wartawan.

Perusahaan penghasil limbah cair seperti halnya Perusahaan PT SANTOSO JAWI ABADI yang beralamatkan di Wonokupang kecamatan Balongbendo, kabupaten Sidoarjo, perusahaan mestinya mempunyai ijin pengelolaan limbah cair, serta surat ijin resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait, serta legalitas perusahaan pengelola limbah tersebut.

Terkait dengan temuan tersebut awak media serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada tanggal 16/07/2023 melakukan investigasi ke lokasi perusahaan penghasil limbah cair di Wonokupang, Balongbendo, kabupaten Sidoarjo.

Pembuangan limbah Cair tersebut terkesan sengaja dilakukan oleh Perusahaan PT SANTOSO JAWI ABADI, buktinya kenapa limbah cair yang sangat berbahaya dibuang di saluran irigasi



adanya pembuangan limbah cairnya, saya akan koordinasi dulu karena pihak perusahaan yang belum mempunyai MOU dengan jasa pengelola limbah cair ujar salah satu staf PT Santoso Jawi Abadi.

Masyarakat warga Wonokupang merasa dirugikan oleh limbah Cair, Warga akan melakukan gerakan orasi atau demo ke perusahaan penghasil limbah Cair yaitu PT SANTOSO JAWI ABADI bila mana pihak penghasil limbah tersebut tidak bertanggung jawab, kata Hari salah satu warga, biar pihak kepolisian serta instansi terkait lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo yang akan mengambil tindakan tegas atas peristiwa tersebut, ucapnya.

Sedangkan pembuang limbah cair di saluran irigasi lingkungan warga desa Wonokupang memang disengaja oleh PT Santoso Jawi Abadi ujar awak media.

DIRKRIMSUS Polda Jatim akan menindaklanjuti perkara ini, bahkan pihak media melakukan pemberitaan yang masif biar pihak kepolisian yang akan melakukan tindakan serta hukuman bagi perusahaan yang melanggar.

Berdasarkan Pasal 104 UU PPLH, pelanggar bisa diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar rupiah. Lebih lanjut lagi, jika aktivitas produksi limbah tersebut dinilai dengan label 'kesengajaan', terdapat tambahan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar pembuangan limbah.

Bahkan dari pihak pemerintah desa Wonokupang, sudah melakukan investigasi serta mengevaluasi terkait temuan limbah cair tersebut, siapa pembuang limbah cair tersebut, yaitu perusahaan yang memproduksi

depan rumah warga, kesengajaan jelas terlihat, perusahaan penghasil kertas karton itu harus bertanggung jawab, ujar imam.

Saat dikonfirmasi awak media pihak perusahaan PT Santoso jawi abadi terkait

terbukti dengan sekuatnya melakukan hal itu tanpa menimbang dampak serta resiko nya pada lingkungan sekitar, Terkait temuan itu team awak media akan menindak lanjuti kasus ini ke pihak yang terkait.

perusahaan yang memproduksi kertas karton.

Menyingkapi permasalahan tersebut pihak desa akan dalam hal ini akan ambil langkah sesuai aturan serta UU yang berlaku di negara ini. (Khol/Bar)

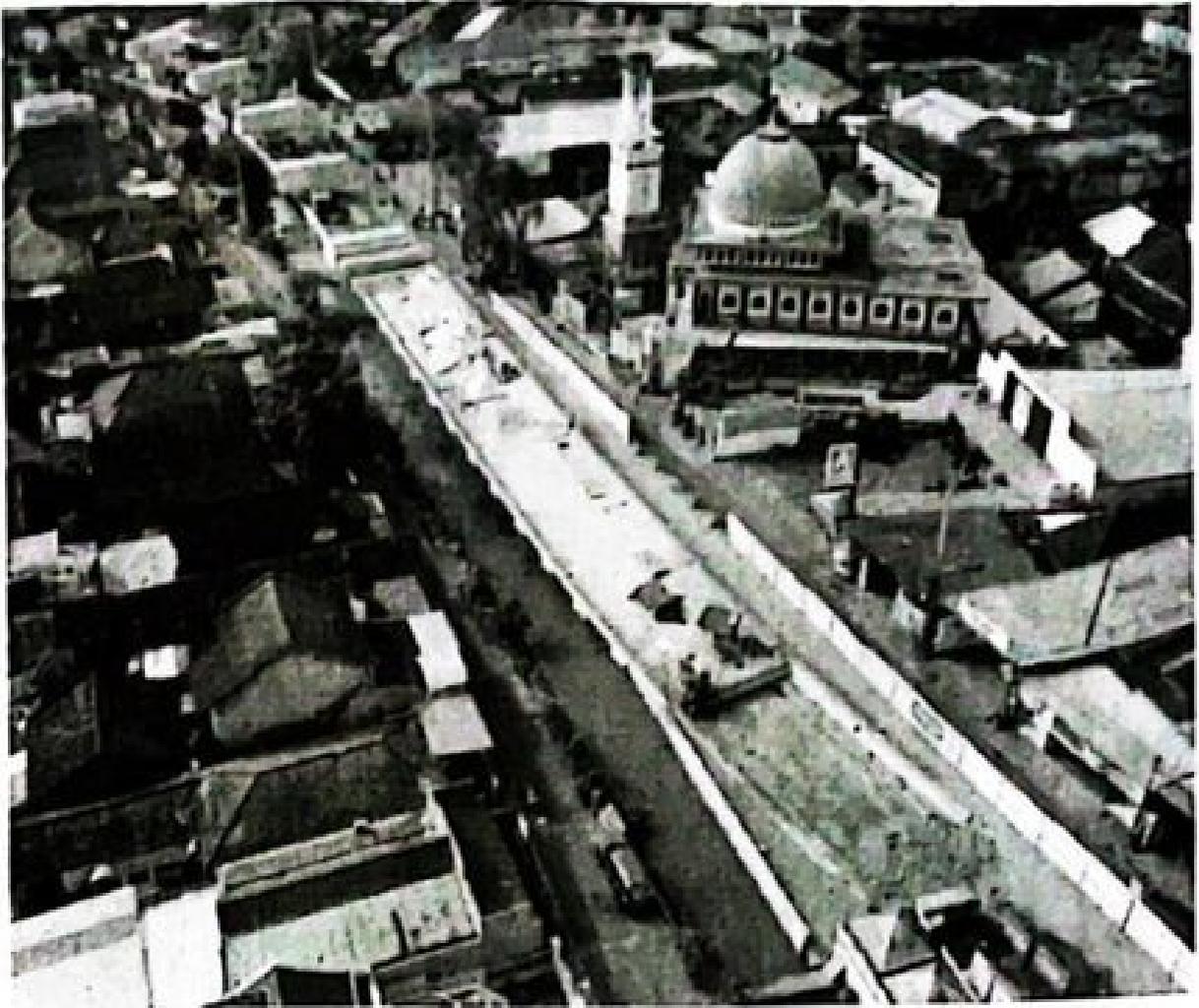
 Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Proyek JPL 64 Krian sedang dikebut.

Proyek JPL 64 Krian Dikebut Target Desember 2023 Finish

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memfinishkan proyek infrastruktur pada akhir tahun 2023. Diantaranya dua proyek besar yaitu pembangunan flyover pengganti JPL 64 km Krian dan pembangunan flyover pengganti JPL 79 km Tarik.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali pada Jumat (14/7/2023) mengatakan kedua proyek tersebut akan selesai pada akhir tahun 2023. Sebab, sejauh ini progres konstruksi untuk JPL 64 Krian sudah mencapai 77 persen. Sedangkan progres konstruksi untuk JPL 79 Tarik mencapai 61 persen.

79 tarik mencapai 61 persen.

“Saya kira cukuplah waktu untuk pengerjaan kedua proyek hingga akhir tahun 2023 ini. Apalagi hanya tinggal mengejar 23 persen untuk JPL 64 Krian, dan 39 persen lagi untuk JPL 79 Tarik. Sehingga nantinya kita harapkan kemacetan di perlintasan sebidang Krian dan Tarik ini akan dapat terurai,” jelasnya.

Pembangunan JPL 64 Krian dan JPL 79 Tarik ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kementerian Perhubungan Ditjen Perkeretaapian serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sekaligus Ketua Tim Percepatan Persiapan Pembangunan Flyover JPL 64 Krian dan JPL 79 Tarik, Bachruni Aryawan mengatakan progres cepat ini merupakan hasil dari kerjasama dan koordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian untuk pembangunan kedua proyek flyover tersebut.

“Kita terus memantau agar proyek flyover Krian dan Tarik ini selesai sesuai target. Sejauh ini kedua proyek menunjukkan progres yang memuaskan,” ucap Bachruni.

Dari Data Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo pembangunan flyover pengganti JPL 64 km Krian 38+897 Lintas Surabaya-Solo mencapai 77 persen dari rencana awal 70 persen, artinya mengalami surplus pengerjaan sebesar 6,668 persen. Sedangkan pembangunan flyover pengganti JPL 79 km Tarik 43+376 Lintas Surabaya-Solo mencapai progres 61 persen dari rencana awal 70 persen atau mengalami deviasi (penurunan dari target) sebesar 9 persen. (Khol/Dy)

CS Dipindai dengan CamScanner

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT





Polresta Sidoarjo saat atur Lalin di saat pelajar da mulai masuk sekolah.

Polisi Sidoarjo Kembali Layani Lalin saat Pagi Aktivitas Sekolah

Sidoarjo, Pojok Kiri

Musim libur sekolah telah usai. Senin (17/7/2023), belajar mengajar di sekolah kembali aktif. Aktifitas guru, murid hingga lalu lalang kendaraan di berbagai kawasan Kabupaten Sidoarjo begitu padat.

Tampak personel Polresta Sidoarjo maupun Polsek jajaran melaksanakan pelayanan pagi di sejumlah ruas jalan raya hingga depan sekolah. Guna berikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya pagi itu yang sedang beraktifitas ke tempat sekolah.

Kabag Ops Polresta Sidoarjo Kompol Christian Bagus Yulianto menjelaskan, sejumlah personel diturunkan ke kawasan sekolah tujuannya untuk berikan rasa aman dan nyaman masyarakat. Sehingga kembali aktifnya belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar.

“Pelaksanaan tugas pagi melayani di saat kembali aktifnya sekolah setelah libur panjang, adalah dengan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan raya, pengamanan secara profesional dan humanis di

kawasan sekolah serta berikan edukasi masyarakat pentingnya keselamatan berkendara,” jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan pagi melayani di kawasan sekolah juga sejalan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2023 yang masih dilaksanakan Polisi sampai dengan tanggal 23 Juli 2023.

Operasi Patuh Semeru 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalulintas, sekaligus menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

“Sebab itu di tengah padatnya aktifitas kembali ke sekolah, kami hadir untuk menjaga kondusifitas kamtibmas serta berikan edukasi masyarakat, termasuk para pelajar supaya turut wujudkan Kamseltibcarlantas,” lanjutnya (Khol/Es)



PENGENALAN: Siswa baru di SDN Pucang 4 diantar orang tuanya masuk sekolah.

Wabup: Stop Bullying saat MPLS

KOTA-Semua sekolah mulai jenjang TK/RA, SD, SMP hingga SMA/SMK melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Beberapa siswa baru juga mulai beradaptasi dengan sekolahnya tersebut.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi yang meninjau salah satu sekolah, Senin (17/7) mengatakan, kegiatan MPLS ini positif bagi siswa baru yang baru masuk dan pada fase

transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pihak sekolah juga harus memperhatikan batasan MPLS sesuai regulasinya Permendikbud No 18 Tahun 2016. Jangan membebani siswa dengan tugas yang menyulitkan.

"Seyogyanya untuk kegiatan MPLS bagi siswa baru, memberikan pengalaman baru yang menyenangkan dan mengesankan," ungkapnya.

Dia mengimbau kepada para

siswa, terutama siswa baru, untuk menghindari bullying dan narkoba. Keduanya bisa merusak generasi bangsa.

"Bullying ini dampaknya luar biasa sekali, bukan hanya dampak secara fisik saja namun juga secara psikis. Selain itu reputasi instansi atau lembaga sudah pasti akan terkena imbasnya," jelasnya.

Melalui kegiatan MPLS ini, harapannya akan membentuk

● Ke Halaman 10



Wabup: Stop Bulliyng...

siswa menjadi insan yang beriman, disiplin, berakhlak mulia, kreatif dan berprestasi.

Sementara itu, hari pertama masuk SDN Pucang 4 Sidoarjo sangat ramai. Terlihat, banyak lalu lalang anak-anak sekolah. Begitu juga orang tua, terlihat sangat antusias bisa mengantarkan anaknya. Mereka menggandeng anak-

nya hingga masuk ke area sekolah.

Akan tetapi, orang tua hanya diperbolehkan menemani anaknya sebelum upacara dimulai. Setelah itu orang tua hanya diperbolehkan menemani anaknya dari luar gapura penyambutan. Di tahun ajaran baru ini, SDN Pucang 4 menerima 53 siswa baru.

Orang tua salah satu siswa baru, Astrid mengatakan, anaknya di hari pertama masih membutuhkan adap-

tasi. Sehingga dia menunggu anaknya hingga pulang sekolah.

"Rumah jauh, anak masih kecil, sehingga masih perlu diantarkan," ucap orang tua dari Zaky itu.

Sebenarnya, katanya, dia ingin menemani anaknya hingga masuk ruang kelas. Sebab ia sangat ingin melihat anaknya belajar di dalam kelas. "Tapi mau gimana lagi. Saya ikuti saja aturannya," katanya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dishub Minta PT ISS-KSO Bayar Rp 106,6 Miliar

Sidang Perdana
Layanan Parkir Digelar

SIDOARJO - Polemik pengelolaan layanan parkir di Sidoarjo antara Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Service (ISS)-Kerja Sama Operasi (KSO) melaju ke persidangan kemarin (17/7). Dishub menyampaikan 12 petitum atau tuntutan. Di dalamnya, termuat permintaan agar PT ISS membayar keserakan

lelang, denda, hingga proyeksi keuntungan yang ditotal mencapai Rp 106,6 miliar.

Sidang perdana kasus perdata tersebut dipimpin hakim R.A. Didi Ismiatun dengan nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda. Dishub Sidoarjo menjadi penggugat dan PT ISS sebagai tergugat. Sidang di Ruang Cakra PN Sidoarjo itu berlangsung kurang dari 10 menit.

"Kami anggap gugatan yang diunggah di e-court sudah dibacakan. Untuk sidang

selanjutnya, para pihak tidak perlu datang ke PN Sidoarjo hingga nanti putusan sela pada 14 Agustus 2023," tegas Didi.

Jaksa pengacara negara Haris Nurrahaju dan Gita Rathil yang mewakili Dishub Sidoarjo mengamini pernyataan hakim. Ayu -sapaan Nurrahaju- mengatakan, dalam gugatan yang diunggah di e-court, setidaknya ada 12 tuntutan. Di antaranya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan tindakan

wanprestasi terhadap ketentuan perjanjian kerja sama (PKS), dan menyatakan PKS berakhir.

Dengan demikian, dishub memerintah tergugat untuk mengembalikan penguasaan atas objek perjanjian dalam keadaan bersih kepada penggugat. Jika tidak dilakukan, penggugat berhak untuk melakukan pembersihan dan pengosongan objek kerja sama dengan beban biaya menjadi tanggung jawab tergugat. Selain itu, dalam gugatan tersebut,

penggugat memerintah tergugat untuk membayar denda keterlambatan penyeteroran imbal jasa layanan perparkiran berupa uang tunai sebesar 0,05 persen per hari keterlambatan pembayaran, yakni Rp 5.856.425.000.

"Kami juga meminta tergugat segera membayar Rp 32 miliar sebagai proyeksi keuntungan nyata sesuai perjanjian serta ditambah Rp 68,8 miliar sebagai proyeksi keuntungan jika lahan parkir tidak dikerjasamakan

dengan PT ISS," lanjut Ayu. Jika ditotal, nilainya Rp 106,6 miliar. Perhitungan dimulai April 2022 hingga Juni 2023.

Sementara itu, pengacara PT ISS Bonafius Marbun mengatakan bahwa pihaknya bersama tim tengah mempelajari materi gugatan yang sudah diajukan. "Kami pelajari dulu gugatannya apa dan permintaannya apa untuk menyiapkan jawaban yang akan kami sampaikan nanti," ujarnya. (fur/uzi/c7/any)



CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

10 Balita Telantar Kini Punya Orang Tua Asuh

SIDOARJO - Sebanyak 10 anak binaan atau calon anak angkat (CAA) dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Sosial Asuhan Balita (UPT PPSAB) Sidoarjo dilepas kepada 10 pasangan calon orang tua angkat (COTA) kemarin (17/7).

Kasi Perlindungan Sosial UPT PPSAB Sidoarjo Riyanti menyatakan, 10 COTA yang dipilih untuk mengasuh balita tersebut berasal dari beberapa kota di Jawa Timur. "Ada yang dari Sidoarjo, Surabaya, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Sumenep datang dalam acara ini," ungkapnya.

COTA yang datang dalam kesempatan tersebut sudah melalui proses seleksi dan pemenuhan persyaratan. Hingga akhirnya bisa mendapatkan SK asuh dari pihak tim pertimbangan izin pengangkatan anak. "SK asuh ini baru awal dan dengan surat tersebut para COTA ini diizinkan untuk merawat atau mengasuh balita



BERI KASIH SAYANG: Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menyerahkan balita dari UPT PPSAB kepada calon orang tua asuh kemarin.

dari kami," ungkapnya.

Balita yang diasuh COTA baru bisa diangkat menjadi anak secara administrasi dan resmi saat sudah keluar SK pengangkatan anak. "Jadi, ini 10 pasangan akan dibiarkan mengasuh balita ini selama enam bulan," katanya. Setelah itu, pihak

tim pertimbangan izin pengangkatan anak bersama UPT PPSAB akan mengecek kembali. "Dari situ baru diputuskan apakah anak baik-baik saja di lingkungan barunya, selepas itu baru bisa kita berikan SK pengangkatan anak," jelasnya.

Sebanyak 10 balita asuh yang

diserahkan kemarin berusia kurang dari setahun sampai umur 2,5 tahun.

"Kebanyakan laki-laki, perempuannya hanya ada dua," imbuhnya. Menurut dia, tidak semua anak asuh yang ada di UPT PPSAB Sidoarjo bisa diberikan. Perlu waktu pencocokan saat COTA pertama datang dan memberikan permohonan. "Selain umurnya, ada beberapa faktor lainnya seperti kesiapan anak, kemudian kesehatan juga," tuturnya.

Riyanti menyatakan, tidak ada anak yang tergolong disabilitas yang diserahkan kepada COTA. "Ada memang anak asuh disabilitas, tapi saat ini belum ada yang siap, baik dari balita ataupun COTA," imbuhnya. Balita yang bisa diserahkan ke COTA biasanya sudah melewati tiga bulan sejak pertama ditemukan. "Kami infokan ke publik dulu selama tiga bulan baru nanti jika tidak ada, kita siapkan untuk bertemu orang tua asuh," katanya. (eza/c6/any)

Jawa Pos



INFRASTRUKTUR



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

PERLU PEMBENAHAN: Kondisi jalan rusak di Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran.

Rusak, Jalan Desa Banjarsari Diperbaiki Waskita

BUDURAN-Jalan rusak di Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran dikhianatkan oleh pengguna jalan. Salah satu titik jalan rusak berada di depan lapangan sepak bola desa setempat.

CS Dipindai dengan CamScanner

● **Ke Halaman 10**

Rusak, Jalan Desa...

Selain itu di depan deretan warung kopi juga rusak parah dan bergelombang. Dari pantauan Radar Sidoarjo, Senin (17/7) aspal jalan tersebut hancur. Hanya menyisakan batu yang sewaktu-waktu bisa membahayakan pengguna jalan.

Salah satu pengguna jalan Erik mengatakan, jalan rusak seperti itu membuat dirinya sangat tidak nyaman dalam berkendara. Apalagi ia bekerja mondar-mandir melewati jalan dekat akses Jalan Lingkar Timur itu.

Pria asal Surabaya itu mengungkapkan, di jalan tersebut cukup rawan terjadi macet. Terlebih sewaktu mobil dan truk sedang putar balik.

“Jalan sudah rusak, ditambah macet,” keluhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, bulan ini segera dilakukan pemeliharaan di jalan tersebut. Perbaikan jalan di Desa Banjarsari tidak menggunakan dana dari APBD Sidoarjo. Biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh pihak Waskita. Hal itu karena kerusakan jalan merupakan dampak dari proyek Spam Waskita.

“Sesuai dengan janji, mereka yang akan memperbaiki,” ungkapnya.

Di sisi lain, DPUBMSDA Sidoarjo sedang mengerjakan proyek betonisasi di jalan Banjarsari–Damarsi sepanjang 1,8 kilometer. (sai/nis/vga)